

# **ANALISIS PERAN MANAJEMEN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MENGAPLIKASIKAN VISI DAN MISI**

**Kasmeni<sup>1</sup>, Risma<sup>2</sup>, Irmawati<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Watampone  
e-mail: [kasmeni2101@gmail.com](mailto:kasmeni2101@gmail.com)

<sup>2</sup>Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Pattiro  
e-mail: [rysmaramadani29@gmail.com](mailto:rysmaramadani29@gmail.com)

<sup>3</sup>Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Bajoe  
e-mail: [irmawatiamir92@gmail.com](mailto:irmawatiamir92@gmail.com)

## ***ABSTRACT***

This study aims to determine the role of education policy management and to find out the role of education policy management in applying the vision and mission and has uses for various parties, both from the place of research and from the researchers themselves. This research is descriptive qualitative, the source of the data in this study determines the subject and object of the research, the method of collecting data by referring to the interview guidelines, observation, and documentation. The results showed that the analysis of the role of education policy management in applying the vision and mission of the school. To create quality education, it cannot be separated from the vision and mission of education, the stronger the vision and the better the mission, the more qualified the human resources that can be produced so that in applying the vision and mission of education requires policy as a guide or basis in every implementation.

***Keywords:*** *Management, Education policy and vision mission*

## ***ABSTRAK***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran manajemen kebijakan pendidikan dan untuk mengetahui peranan manajemen kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi. Serta memiliki kegunaan untuk berbagai pihak, baik itu dari pihak tempat penelitian maupun dari pihak peneliti sendiri. Penelitian ini termasuk *deskriptif kualitatif*, sumber data dalam penelitian ini menentukan subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan datanya dengan mengacu pada pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis peran manajemen kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi sekolah. Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas maka tak lepas dari visi dan misi pendidikan, semakin kuat visi dan semakin baik misinya maka akan semakin berkualitas juga sumber daya manusia yang dapat dihasilkan sehingga dalam mengaplikasikan visi dan misi pendidikan membutuhkan kebijakan sebagai pedoman atau dasar dalam setiap pelaksanaannya.

**Kata Kunci :** Manajemen, Kebijakan Pendidikan dan visi misi

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi yang dahulu ke generasi selanjutnya agar nilai-nilai pendidikan tersebut tetap terpelihara dan terjaga bahkan butuh dikembangkan. Dengan demikian, keberadaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran pemerintah sebagai penguasa. Hal ini karena kompleksitas penyelenggaraan pendidikan yang terus berlanjut serta pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat beragam dan membutuhkan campur tangan pemerintah.

Disamping itu masyarakat memiliki keterbatasan, sedangkan pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan yang dapat menjamin keberadaan dan keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan apabila proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai berbagai macam konflik dan pertentangan serta dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang sulit ditangani oleh masyarakat sehingga intervensi pemerintah berupa kebijakan yang diharapkan menjadi solusi terbaik.<sup>1</sup>

Dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia dewasa ini, pendidikan cenderung diartikan sebagai usaha sadar untuk membantu perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan. Secara lebih umum, pendidikan

---

<sup>1</sup>Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 30.

dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pembimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh pendidik kepada peserta didik kearah suatu tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Dengan kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan pendidikan, khususnya bab 14 pasal 50 menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.<sup>3</sup>

Pengelolaan sekolah secara tidak profesional dapat menghambat langkah sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan sekolah secara efektif dan efisien. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi. Perumusan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan pengelola sekolah, agar sekolah memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 5.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, bab 14, pasal 51.

<sup>4</sup>Mudjtahid, "Proses Manajemen Dan Pentingnya Visi Misi Lembaga Pendidikan", *Blog Mudjtahid*. <http://mujtahid269.blogspot.com/2014/07/proses-manajemen-dan-pentingnyavis>.

Bicara tentang menciptakan pendidikan yang bermutu maka tak lepas dari visi dan misi dari lembaga pendidikan itu sendiri, semakin kuat visi dan semakin baik misinya maka akan semakin berkualitas juga sumber daya manusia yang dapat dihasilkan. Peran dari seorang guru sangatlah penting dan juga sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan potensi sumber daya manusia dan juga dalam menjalankan visi dan misi sekolah. Setiap pendidik wajib memahami dan mengerti tentang visi dan misi sekolah tempat dia mengabdikan karena semua itu dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar dan menentukan kemajuan dari sekolah, jika pendidik tidak mengerti visi dan misi dari sekolah bisa berakibat kemunduran bahkan kegagalan dalam sekolah.<sup>5</sup>

Dalam proses manajemen salah satu tugas kepala sekolah ialah membenahi semua fungsi manajemen dengan baik, supaya tujuan optimal dapat dicapai. Salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah mampu merumuskan visi dan misi sekolah yang dipimpinnya. Karena visi sekolah erat kaitannya dengan siswa maka proses pendidikan harus fokus pada pelayanan yang baik kepada siswa, bukan hanya kepada pejabat dinas pendidikan, dan kepala sekolah. Sehingga, siswa harus dilayani dengan penuh perhatian agar merasa nyaman dan bahagia dalam belajar serta dengan senang hati dan penuh kesungguhan untuk meraih masa depannya masing-masing.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari,

---

<sup>5</sup>Ekosyaritjo, "Peningkatan Potensi Melalui Mutu Yang Berkualitas Yang Ditunjang Oleh Visi Dan Misi Yang Bermutu", *Blog Ekosyaritjo*. <http://ekosyaritjo.blogspot.com/2013/02/pengertian-visi-dan-misi>.

mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang Peranan manajemen kebijakan pendidikan dalam mengimplementasikan visi dan misi.. Sumber data terbagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara (interview), dan dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi), tahap analisis data dan tahap pelaporan. Sedangkan analisis data menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Cara yang dilakukan dalam memperoleh kebenaran penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi metode dan sumber. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami bagaimana perana manajemen kebijakan pendidikan dalam mengimplementasikan visi dan misi. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Manajemen adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan kerjasama dengan orang lain. Meskipun cenderung mengarah pada fokus tertentu, para ahli masih berbeda pandangan dalam mendefinisikan manajemen. Manajemen sering diartikan sebagai seni, ilmu, sistem, proses, dan fungsi.

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dapat ditambahkan, kebijakan

mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.<sup>6</sup>

### **1. Pengertian Manajemen Kebijakan Pendidikan**

Manajemen kebijakan pendidikan adalah kemahiran dan kebijaksanaan seorang pembuat kebijakan dalam menetapkan suatu keputusan melalui pertimbangan yang didasarkan atas ketentuan dari pimpinan, pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman dalam membuat keputusan yang selanjutnya menjadi dasar untuk mengoperasikan pendidikan.<sup>7</sup>

Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan untuk dipedomi oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.<sup>8</sup>

Kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan penggabungan dari kata education dan policy. Kebijakan adalah seperangkat aturannya, sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya. Dengan demikian, kebijakan

---

<sup>6</sup>Syafaruddin, *Efektivitas kebijakan pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 75.

<sup>7</sup>Hasibuan, “Dasar-Dasar Perbankan”, dalam Kompri, *Manajemen Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: Alfabeta, 2015), h. 1.

<sup>8</sup>Syafaruddin, *Efektivitas kebijakan pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, h.77

pendidikan tidak terlalu berbeda dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.<sup>9</sup>

## **2. Tujuan Kebijakan Pendidikan**

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan perlu pemahaman tentang pandangan terhadap tujuan kebijakan yaitu (1) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat, (2) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, (3) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi.<sup>10</sup>

### **a. Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat**

Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat, dapat ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Pendidikan dapat membentuk seseorang menjadi lebih baik sebelum ia dididik. Melalui pendidikan diajarkan bagaimana nilai-nilai kebaikan kepada seseorang, sehingga ia mengetahui mana yang baik mana yang buruk. Jadi pendidikan merupakan proses menyempurnakan harkat dan martabat manusia yang diupayakan secara terus menerus.

### **b. Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan politisi**

Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan politisi dapat ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warga Negara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan

---

<sup>9</sup>Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*, h.37

<sup>10</sup> Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*, h. 39.

perilakunya semakin demokratis. Selain itu, orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.

c. Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi

Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi dapat ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi, pendidikan dapat membantu siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup. Secara umum, terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini karena orang yang berpendidikan lebih produktif dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan.
- 2) Investasi pendidikan memberikan nilai balik yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang memasuki dunia kerja.

### **3. Analisis Peran Manajemen Kebijakan Pendidikan Dalam Mengaplikasikan Visi Dan Misi Sekolah**

Sekolah sebagai lembaga pendidikan tentu memiliki posisi yang krusial dan determinatif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena salah satu kendala utama peningkatan kualitas tersebut terletak pada proses pengelolaan sekolah dan pengelolaan pembelajaran yang tidak berkembang secara profesional. Dari

argumentasi obyektif inilah sehingga tidak mengherankan jika sekolah menjadi obyek sasaran pertanyaan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan, penting ditingkatkan kinerja dan produk ide kreatif yang menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman yang ada sehingga dapat menciptakan keberhasilan dunia pendidikan yang didambakan, dengan berbagai upaya peningkatan mutu pengelolaan dan mutu hasil pembelajarannya.<sup>11</sup> Manajemen didefinisikan sebagai kegiatan mengelola berbagai sumber daya dengan cara bekerjasama dengan orang lain melalui proses tertentu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.<sup>12</sup>

Analisis kebijakan pendidikan menjadi penting dalam menentukan arah dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di suatu Negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mungkin melepaskan dari kebijakan yang dibuat pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan di tempat wilayah pendidikan itu ada (ada lembaga pendidikan negeri dan swasta). Dengan melakukan analisis kebijakan kita dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak terkait sebagai pengelola pendidikan dengan akurat.<sup>13</sup>

Visi adalah idealisasi pemikiran tentang masa depan organisasi yang merupakan kekuatan kunci bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya dan perilaku organisasi yang maju dan antisipatif terhadap persaingan global sebagai tantangan zaman<sup>14</sup> Visi memotivasi warga sekolah dalam bekerja,

---

<sup>11</sup>Abd. Rahman Getteng, *Pendidikan Islam dalam Pembangunan* (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1997), h.25

<sup>12</sup>Bar Hartani, *Manajemen Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Laksibang Press. 2011), h. 141

<sup>13</sup>Abd. Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Cet. 1; Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 8

<sup>14</sup>Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2010), h.143.

melaksanakan program rutin dan program pengembangan. Jika warga sekolah tidak ikhlas dan baik dalam bekerja, maka program tidak akan terlaksana dengan baik, dan berakibat pada kegagalan pencapaian visi sekolah.<sup>15</sup>

Misi merupakan tujuan utama yang dibentuk oleh orang, tim, atau organisasi. Misi disimpulkan dalam pernyataan yang singkat, jelas dan memberiminspirasi yang memusatkan perhatian di dalam satu arah yang jelas dengan manfaat dari keunikan individu, bisnis, atau kelompok. Misi merupakan rumusan umum mengenai tindakan (upaya-upaya) yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang jelas akan sangat membantu pencapaian hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan masyarakat, termasuk di dalamnya efisiensi penggunaan anggaran.<sup>16</sup>

Adapun implikasi dari manajemen kebijakan pendidikan ialah mampu mengatur jalannya proses kegiatan organisasi dan kegiatan manajemen yang selalu memprioritaskan kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah seperti tersedianya guru-guru profesional guna mencerdaskan peserta didik sehingga mencapai tujuan pendidikan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas sebagai ruang proses belajar mengajar yang nyaman, aman, tertata rapi dan bersih. Dengan demikian diharapkan kepada pihak sekolah terutama kepada Kepala Sekolah sebagai pemimpin yang diharapkan dalam setiap mengambil langkah berupa keputusan agar senantiasa memperhatikan kebutuhan sekolah.

---

<sup>15</sup>Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan : Teori, Kebijakan, dan Praktik*, ( Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 254.

<sup>16</sup>Cynthia D. Scott, dkk., *Visi, Nilai, dan Misi Organisasi*, h. 4.

Internalisasi visi sangat esensial bagi orang-orang yang menjalankan fungsi kepemimpinan, terutama bagi mereka yang menduduki posisi puncak, seperti rektor, dekan, dan pejabat tinggi kependidikan ditingkat departemen. Kepala sekolah pun, meski berada pada tingkat mikro, harus memiliki visi yang jelas. Dalam kaitan ini, kontter berpendapat bahwa visi merupakan komponen sentral dari semua great leadership. Termonologi great leadership merujuk pada 2 hal. Pertama adalah orang-orang yang duduk pada posisi pimpinan yang benar-benar piawai dalam menjalankan tugas okok dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif,efisien,dan dengan akuntabilitas tertentu. Kedua adalah posisi-posisi strategis yang diduduki oleh manusia organisasional, seperti eksekutif puncak, rektor perguruan tinggi, direntuk akademik, direktor dan sebuah direktorat, dan pejabat tinggi negara.

Kepala sekolah/madrasah dituntut mempunyai kompetensi profesional sebagai pemimpin dan manajer di sekolah supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan dengan sebaik mungkin termasuk di dalamnya sebagai pemimpin pengajaran. Selain itu juga agar kepala sekolah dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan seefektif mungkin untuk Kepala sekolah/madrasah dituntut mempunyai kompetensi profesional sebagai pemimpin dan manajer di sekolah supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan dengan sebaik mungkin termasuk di dalamnya sebagai pemimpin pengajaran. Selain itu juga agar kepala sekolah dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan seefektif mungkin untuk.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Saril, 'Penerapan Manajemen Pendidikan Dalam Mewujudkan Visi Sekolah', *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7.1 (2018), 584-603 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i1.307>>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang analisis peran manajemen dalam mengaplikasikan visi dan misi sekolah , maka dapat disimpulkan bahwa:

Analisis kebijakan pendidikan menjadi penting dalam menentukan arah dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di suatu Negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mungkin melepaskan dari kebijakan yang dibuat pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan di tempat wilayah pendidikan itu ada (ada lembaga pendidikan negeri dan swasta). Dengan melakukan analisis kebijakan kita dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak terkait sebagai pengelola pendidikan dengan akurat.

Adapun saran dari jurnal ini mengenai peran analisis manajemen kebijakan pendidikan ialah mampu mengatur jalannya proses kegiatan organisasi dan kegiatan manajemen yang selalu memprioritaskan kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah seperti tersedianya guru-guru profesional guna mencerdaskan peserta didik sehingga mencapai tujuan pendidikan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas sebagai ruang proses belajar mengajar yang nyaman, aman, tertata rapi dan bersih.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Engkoswara Aan Komariah. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Abd. Madjid. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2018
- Bar Hartani, *Manajemen Pendidikan* . Yogyakarta: Laksibang Pressindo. 2011
- Cynthia D. Scott, dkk.. *Visi, Nilai, dan Misi Organisasi*
- Ekosyaritjo. “Peningkatan Potensi Melalui Mutu Yang Berkualitas Yang Ditunjang Oleh Visi Dan Misi Yang Bermutu”, *Blog Ekosyaritjo*.  
<http://ekosyaritjo.blogspot.com/2013/02/pengertian-visi-dan-misi>.
- Getteng. Abd. Rahman. *Pendidikan Islam dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1997
- Hasibuan. “Dasar-Dasar Perbankan”, dalam Kompri, *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Alfabeta, 2015.
- Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan : Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
- Mudjtahid. “Proses Manajemen Dan Pentingnya Visi Misi Lembaga Pendidikan”,  
*Blog*  
*Mudjtahid*. <http://mujtahid269.blogspot.com/2014/07/proses-manajemen-dan-pentingnyavis>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. bab 14. pasal 51.

- Rusdiana Ahmad. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia. 2015
- Saril. 'Penerapan Manajemen Pendidikan Dalam Mewujudkan Visi Sekolah', *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7.1 (2018), 584-603 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i1.307>>
- Syafaruddin, *Efektivitas kebijakan pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010